

# Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Proses Pengelolaan Gaji Pegawai PNS di Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bogor

Safinatun Nazah<sup>1</sup>, dan Farizka susandra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Universitas Djuanda, finazah8@gmail.com

<sup>2</sup>Akuntansi, Universitas Djuanda, farizkasusandra2@gmail.com

---

## ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan fokus pada penerapan sistem penggajian pegawai. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada pentingnya sistem penggajian yang efektif sebagai bagian dari administrasi kepegawaian, terutama dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran pelayanan publik. Tujuan dari KKL ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penggajian berbasis digital diterapkan, kendala yang dihadapi, serta perannya dalam mendukung administrasi kepegawaian. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai terkait. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem penggajian berbasis aplikasi di instansi ini telah membantu mempercepat proses pencatatan, perhitungan, dan penyaluran gaji pegawai. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan input data, ketergantungan pada operator tertentu, gangguan listrik maupun internet, serta penundaan pembayaran gaji jika bertepatan dengan hari libur. Secara umum, penerapan sistem penggajian di Dinas KUKMPP Kota Bogor sudah mendukung kelancaran administrasi kepegawaian. Meski demikian, perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai, penguatan infrastruktur teknologi, serta penyusunan pedoman operasional agar sistem dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Sistem Penggajian, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Administrasi Kepegawaian, KKL

## PENDAHULUAN

Penggajian merupakan salah satu elemen penting dalam sistem administrasi kepegawaian, khususnya di lingkungan instansi pemerintahan. Menurut Mathis dan Jackson (2010), gaji tidak sekadar menjadi bentuk kompensasi finansial, tetapi juga berperan besar dalam menjaga motivasi, kepuasan, serta loyalitas pegawai terhadap organisasi. Oleh sebab itu, proses penggajian harus dilaksanakan dengan tepat waktu, akurat, dan transparan agar tidak menimbulkan permasalahan yang berpengaruh

terhadap kinerja dan stabilitas instansi. Ketidaktepatan dalam perhitungan atau keterlambatan pembayaran dapat menurunkan semangat kerja pegawai dan berdampak pada efektivitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem penggajian memiliki peranan ganda, yaitu sebagai instrumen administrasi kepegawaian sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran publik. Oleh karena itu, pengelolaan gaji harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai instansi pemerintah mulai meninggalkan metode penggajian manual yang dinilai lambat dan rawan kesalahan. Proses manual cenderung menimbulkan permasalahan seperti duplikasi data, ketidaksesuaian pencatatan keuangan, serta keterlambatan pelaporan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya inovasi berupa digitalisasi sistem keuangan dan penerapan *Sistem Informasi Akuntansi* (SIA) dalam proses penggajian.

SIA dirancang untuk mengelola dan mengolah data keuangan secara terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penggajian, sistem ini mampu memproses berbagai komponen seperti data kehadiran pegawai, perhitungan tunjangan dan potongan, serta pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Melalui penerapan sistem berbasis digital, proses penggajian dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan dibandingkan metode manual.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (KUKMPP) Kota Bogor merupakan salah satu instansi yang telah memanfaatkan SIA dalam mengelola administrasi keuangannya. Dengan adanya sistem ini, seluruh proses penggajian dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Data pegawai, tunjangan, potongan pajak, serta laporan keuangan dapat diproses secara otomatis sehingga mempercepat alur kerja bagian keuangan dan meningkatkan akurasi pencatatan. Selain itu, SIA juga memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi karena seluruh data tersimpan dalam basis sistem yang terpusat dan dapat diakses secara real-time.

Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan sistem penggajian digital juga memiliki sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterlambatan dalam input data karena keterbatasan kemampuan operator, ketergantungan terhadap pegawai tertentu yang menguasai sistem, serta gangguan teknis seperti padamnya listrik atau tidak stabilnya jaringan internet. Selain itu, perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang cukup sering juga mengharuskan penyesuaian sistem agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Di sisi lain, waktu pembayaran gaji yang bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama juga dapat menghambat kelancaran proses pencairan, sehingga diperlukan perencanaan dan koordinasi yang baik antarbagian terkait.

Dalam hal ini, keberhasilan implementasi SIA tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan manajerial yang memadai. Pelatihan bagi pegawai, pembaruan sistem secara berkala, serta perawatan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sistem agar berfungsi optimal. Sinergi antara bagian keuangan, kepegawaian, dan teknologi informasi juga diperlukan untuk menciptakan alur kerja yang efisien dan bebas dari kesalahan administratif.

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, dilakukan analisis mengenai bagaimana sistem penggajian diterapkan di Dinas KUKMPP Kota Bogor, sejauh mana perannya dalam menunjang administrasi kepegawaian, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses penggajian.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengembangkan sistem administrasi keuangan berbasis digital. Dengan penerapan SIA yang tepat, pemerintah daerah dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan,

akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip *good governance*, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan KKL ini adalah **deskriptif kualitatif**. Metode ini dipilih untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. **Observasi langsung**, dengan mengamati proses penggajian mulai dari penginputan data, perhitungan, hingga penyaluran gaji ke rekening pegawai.
2. **Wawancara**, dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan penggajian untuk memperoleh informasi terkait alur kerja, kendala, dan solusi yang dijalankan.
3. **Dokumentasi**, berupa telaah arsip dan dokumen pendukung sistem penggajian, seperti daftar hadir pegawai, slip gaji, serta laporan administrasi kepegawaian.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran sistem penggajian dalam mendukung administrasi kepegawaian serta permasalahan yang dihadapi tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik yang mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Sistem Penggajian terhadap Administrasi Kepegawaian

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem penggajian berbasis aplikasi digital di Dinas KUKMPP Kota Bogor memberikan kontribusi besar dalam mendukung kelancaran administrasi kepegawaian. Peran yang terlihat antara lain:

- **Meningkatkan efisiensi waktu**, karena proses pencatatan dan perhitungan gaji dilakukan lebih cepat dibanding metode manual.

- **Menjamin akurasi data**, sehingga kesalahan dalam perhitungan gaji, tunjangan, maupun potongan dapat diminimalisir.
- **Mendukung transparansi dan akuntabilitas**, karena seluruh data penggajian tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Mempermudah monitoring dan evaluasi**, laporan penggajian dapat diakses oleh bagian terkait maupun pimpinan dengan lebih cepat dan terstruktur.

Dengan peran tersebut, sistem penggajian tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga tertib administrasi dan tata kelola yang baik (*good governance*).

## 2. Kendala yang Dihadapi

Meskipun perannya cukup signifikan, dalam praktiknya sistem penggajian masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- **Keterlambatan input data** ketika terjadi penumpukan pekerjaan di akhir bulan.
- **Ketergantungan pada operator tertentu**, sehingga apabila pegawai yang menguasai sistem berhalangan hadir, proses penggajian dapat tertunda.
- **Gangguan teknis**, seperti pemadaman listrik dan lemahnya koneksi internet, yang menghambat kelancaran transfer gaji.
- **Penyesuaian waktu pembayaran**, apabila tanggal gajian bertepatan dengan hari libur atau tanggal merah, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## 3. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas sistem penggajian, instansi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Peningkatan kompetensi pegawai** melalui pelatihan rutin agar semua pegawai yang terlibat memahami sistem dengan baik.
- **Penguatan infrastruktur teknologi**, misalnya penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer memadai, serta UPS untuk mengantisipasi gangguan listrik.

- **Penyusunan SOP digital** dan media pembelajaran seperti video tutorial, sehingga mekanisme sistem dapat dipahami juga oleh pegawai baru.
- **Evaluasi berkala**, guna memastikan sistem penggajian berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan standar yang berlaku.

## KESIMPULAN

Sistem penggajian berbasis aplikasi digital di Dinas KUKMPP Kota Bogor telah berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi kepegawaian. Sistem ini membantu mempercepat pencatatan, perhitungan, serta penyaluran gaji, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja pegawai. Namun, masih terdapat kendala seperti keterlambatan input data, ketergantungan pada operator tertentu, gangguan teknis, serta penyesuaian waktu pembayaran gaji pada hari libur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyusunan SOP digital agar sistem penggajian dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta praktik langsung selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (KUKMPP) Kota Bogor, maka diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Pengelolaan Gaji Pegawai  
Sistem Informasi Akuntansi terbukti memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan gaji pegawai, baik bagi ASN maupun Non-ASN. Dengan menggunakan aplikasi SIPD-RI dan sistem pendukung Kuarta SIMRAL, proses penggajian menjadi lebih tertata, sistematis, dan akurat. Peran SIA mencakup otomatisasi dalam perhitungan gaji pokok, tunjangan (keluarga, jabatan, kinerja), serta potongan-potongan (PPH 21, BPJS, dan lainnya), yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berisiko tinggi terhadap kesalahan. SIA juga berperan dalam menjaga transparansi karena seluruh proses dicatat dalam

sistem dan dapat ditelusuri melalui audit trail. Selain itu, SIA memberikan kemudahan dalam menghasilkan laporan keuangan serta slip gaji secara cepat dan real-time. Dalam konteks pemerintahan, SIA membantu mewujudkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi keuangan negara.

2. Efektivitas Sistem Penggajian dalam Mendukung Administrasi Kepegawaian  
Efektivitas sistem penggajian di Dinas KUKMPP mengalami peningkatan signifikan sejak diterapkannya SIA. Proses yang dulunya membutuhkan waktu hingga 7 hari kerja kini hanya memerlukan maksimal 3 hari. Tingkat kesalahan dalam perhitungan juga menurun drastis, dan pegawai merasa lebih puas karena gaji diterima secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Sistem ini juga mendukung kegiatan administrasi lainnya, seperti rekap absensi, penginputan data tunjangan, dan pelaporan keuangan kepada BPKAD. Meski demikian, efektivitas ini masih terkendala oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan infrastruktur (gangguan listrik dan jaringan) serta kurang meratanya kompetensi SDM yang memahami sistem secara menyeluruh. Dengan kata lain, teknologi sudah tersedia, namun belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan teknis dan personel yang memadai.

## REFERENSI

- Ardana, I. C. (2020). **Sistem Informasi Akuntansi**. Yogyakarta: Mitra Wacana Media.
- Baridwan, Z. (2004). **Intermediate Accounting**. Yogyakarta: BPFE.
- Bogor, B. P. (2025). **Pengelolaan APBD dan pencairan gaji ASN**. Retrieved from BPKAD Kota Bogor: <https://bpkad.kotabogor.go.id>
- Bogor, D. K. (2025). **Aplikasi cadangan penggajian daerah**. Retrieved from Kuarta SIMRAL: Internal Access / Lokal Server
- Carl S. Warren, J. M. ( 2014). *Accounting*. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- Davis, G. B. (1984). **Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development**. New York: McGraw-Hill.

- Davis, G. B. (1991). **Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development**. New York: McGraw-Hill.
- Gillespie, J. (1981). **Financial Information Systems**. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2018). **Accounting information systems (11th ed.)**. Boston, MA: Cengage Learning.
- Hall, J. A. (2013). **Accounting Information Systems**. Boston: Cengage Learning.
- Halim, A. (2016). **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). **Manajemen sumber daya manusia**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indonesia, K. D. (2025). **Sistem pelaporan & pengelolaan keuangan daerah**. Retrieved from SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) : <https://sipd.kemendagri.go.id>
- Indonesia, K. K. (2025 ). **Sistem transfer dana pusat ke daerah**. Retrieved from DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan): <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Indonesia, P. R. (1992). **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. R. (2008). **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. R. (2014). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**. Kementerian Sekretariat Negara: Jakarta.
- Indonesia, P. R. (2019). **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok PNS**. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia, P. R. (2024). **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS**. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). **Intermediate Accounting** (16th ed.). New Jersey: Wiley
- K.C. Laudon, J. L. (2012). **Management Information Systems**. New Jersey: Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). **Management Information Systems: Managing the Digital Firm**. New Jersey: Pearson.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). **Management Information Systems: Managing the Digital Firm**. New Jersey: Pearson.
- Mardiasmo. (2018). **Akuntansi sektor publik**. Yogyakarta: Andi.
- Marshall B. Romney, P. J. (2015). **Accounting Information Systems (13th Edition)**. New Jersey: Pearson Education.
- Meiryani. (2020). **Sistem Informasi Akuntansi: Teori dan Aplikasi**. Jakarta: Media Discourse Indonesia.
- Mubyarto. (2001). **Pengantar ekonomi koperasi**. Jakarta: LP3ES.
- Mulyadi. (2005). **Analisis dan Desain Sistem Informasi**. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2016). **Sistem Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2023). **Sistem Informasi Akuntansi**. Jakarta: Salemba Empat.
- Negara, B. K. (2025). **Informasi ASN dan regulasi penggajian**. Retrieved from BKN.go.id: <https://www.bkn.go.id>
- Romney, M. B. (2015). **Accounting Information Systems**. Boston, MA: Pearson Education.
- Simamora, H. (2004). **Manajemen sumber daya manusia**. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Soetrisno, L. (2010). **Koperasi, ketahanan ekonomi rakyat dan globalisasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sularso, R. A., & Siti, R. (2004). **Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik**. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., & Wong-On-Wing, B. (2000). **Accounting information systems: Essential concepts and applications (4th ed.)**. New York, NY: Wiley.
- Warren, C. S. (2014). **Accounting (25th edition ed.)**. Stamford, CT: Cengage Learning.